



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kejari Warning Kades**

**Bayar Pajak DD dan ADD**

**KOTA BINTUHAN** - Kejari Kaur kemarin (17/2) kembali melakukan pemanggilan terhadap kades-kades yang berada di wilayah 10 kecamatan yang ada di Kaur. Hal ini terkait tindak lanjut temuan pajak yang banyak tidak dibayar dan setorkan oleh oknum kades yang ada di Kaur. Terkait dengan itu Kajari Kaur Tati Vain Sitanggang, SH, MH memastikan untuk dua tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019 semua kades wajib melunasi pajak DD dan ADD.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kajari Kaur kepada RB kemarin. Menurut ibu satu anak ini pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Kaur dan bagian pajak. Menargetkan satu minggu setelah dipanggil semua kades wajib melunasi pajak yang nunggak dan yang kurang bayar. Kendati tidak bisa memastikan angkanya, namun Kajari Kaur memastikan tunggakan pajak DD dan ADD sampai miliaran rupiah selama dua tahun yang belum dibayarkan.

"Untuk angka pastinya pajak yang belum dibayarkan tanya bagian pajak, namun cukup besar. Dan rata-rata pajaknya satu desa itu per tahun Rp 15 juga. Sementara yang belum bayar pajak dua tahun terakhir saja itu jumlah desanya puluhan, belum lagi yang kurang bayar dan sebagainya. Makanya kita

panggil dan kita jelaskan, kita lihat satu minggu ada tidak peningkatan pembayaran pajaknya," kata Kajari Kaur Tati Vain Sitanggang.

Lebih lanjut Tati mengatakan jika dalam satu minggu kades tidak melunasi pajaknya pihaknya kembali akan mempertanyakan dan tidak menutup kemungkinan akan melihat draf dan fisik kegiatan DD yang telah dilakukan. Namun demikian hampir semua kades yang diberikan penjelasan semuanya mengaku siap membayarkan pajak yang belum lunas. Baik itu pajak tahun DD tahun 2018 dan DD tahun 2019 yang lalu.

Untuk diketahui, kegiatan ini akan terus dilakukan setiap tahunnya oleh pihak Kejari Kaur. Bahkan desa yang belum melunasi pajaknya ke depan bisa tidak akan mendapatkan rekomendasi dari OPD terkait untuk mencairkan DD. Dan kegiatan pembayaran pajak ini akan terus dipantau oleh pihak Kejari Kaur dan juga Inspektorat Kaur.

"Untuk sementara semua sudah kita panggil dengan pihak Kejari, jadi kita tunggu satu minggu ke depan desa-desa mana saja yang belum melunasi pajak. Dan mungkin ada kendalanya akan kita sampaikan lagi, yang pasti semua desa wajib melunasi pajak DD dan ADD setiap tahun dan akan terus kita pantau," pungkas Kepala Inspektorat Kaur Three Mar-nope kepada RB. (cik)